**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian di tingkat nasional dan internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan di seluruh sektor industri dan telah mengubah tatanan daya saing industri menuju kolaborasi global yang dikenal sebagai “global supply and value chain”. Sejalan denganglobalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berlangsung cepat danberdampak luas dimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penentu bagipembentukan daya saing dan modernisasi industri. Berbagai perkembangan padatingkat global tersebut telah terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhanekonomi nasional dan daya saing sektor industri.

Elemen penting lain yang diperlukan untuk melengkapi pengembangan daya saing industri adalah peran pemerintah. Peran ini dapat dilihat dengan menguji bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi setiap faktor determinan peningkatandaya saing. Kebijakan yang diimplementasikan tanpa pertimbangan bagaimana pengaruhnya terhadap faktor determinan peningkatan daya saing secara keseluruhankemungkinan akan merugikan keunggulan nasional.[[1]](#footnote-2)

Hingga tahun 2015 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin selama 57 tahun. Hubungan diplomatik ini berbentuk bantuan dan kerjasama termasuk partnership. Partnership atau kemitraan merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan, atau negara sebagai aktor. Kemitraan ini berwujud bantuan berupa materi dan non materi, termasuk juga bantuan melalui Official Development Assistance (ODA). Selanjutnya, salah satu kemitraan baru yang dijalankan Indonesia dan Jepang adalah Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Kehadiran IJEPA semakin menguatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang telah disepakati sejak tahun 1958. Kemitraan ini dilakukan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007.

 Dari berbagai pertemuan antara Jepang dan Indonesia ketika membahas poin-poin rencana kerjasama IJEPA, pemerintah Indonesia tertarik pada kemitraan tersebut karena salah satu poin pembahasan IJEPA adalah kerjasama di bidang industri otomotif. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki industri otomotif, namun berbagai kendala yang dihadapi termasuk disebabkan oleh perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru yang mempengaruhi ketidakkonsistenan kebijakan industri otomotif. Oleh karena itu, kedua negara melakukan negosiasi dengan mengharapkan hasil kerjasama yang berdampak positif bagi keduanya khususnya Indonesia.

Negosiasi antara Indonesia dan Jepang kemudian ditindak lanjuti dengan framework Agreement yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2008 tentang pengesahan *Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for Economic Partnership* -IJEPA. MelaluiFramework Agreementini telah menyepakati dua macam skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka IJEPA, antara lain: (1) skema tarif prefensi umum, skema ini telah menyepakati sekitar 35 persen pos tarif bea masuk Indonesia akan diturunkan menjadi 0 persen, sedangkan Jepang menurunkan sekitar 80 persen pos tarifnya. (2) Skema Tarif User Spesific Duty Freee Scheme(USDFS). USDFS adalah skema pemberian penetapan tarif bea masuk 0 persen atas impor bahan baku dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan proses produksi oleh industri-industri tertentu yang telah disepakati termasuk yang bergerak di bidang kendaraan angkut bermotor dan komponen-komponennya. Sebagai kompensasi dari kemitraan yang terbuka ini, Jepang memberikan bantuan dalam kerjasama ekonomi jangka panjang yang terangkum dalam skema Manufacturing Industri Development Center -MIDEC.[[2]](#footnote-3)

Program dari skema MIDEC ini adalah bantuan teknis dari Jepang untuk *capacity building* yang meliputi otomotif, welding, elektronik, tekstil, makan, dan minuman, baja, export dan import promotion, dan small & medium enterprises.[[3]](#footnote-4)Akan tetapi melalui MIDEC yang juga merupakan implmenetasi dari pelaksanaan IJEPA bagi Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada *Agreement Between The Government of Japan and The Government of The Republic of Indonesia Pursuant To Article 13 Of The Agreement Between Japan And The Republic of Indonesia For An Economic Partnership*, yang telah disetujui pada Chapter 7 Cooperation, Section 1 Cooperation In The Field Of Manufacturing Industries Article 23 And Article 24:

“**Article 23**, *Basic Principles: Pursuant to chapter 13 of the basic agreement, the parties, recognizing the fundamental role of manufacturing industries in enhancing the dynamism and the competitiveness of the national economies of their respective countries, shall cooperate in promoting the development of manufacturing industries of both countries”,* dan

*“****Article 24,*** *Areasand forms of Cooperation Pursuant to Article 135 of The Basic Agreement:*

1. *The areas of cooperation under this section may include: (i) strengthening of competitiveness of manufacturing industries including, interalia, management, technology, research and development activities, and industrial standard; (ii) human resource development related to manufacturing industries; and (iii) improvement of manufacturing industry infrastructure; and*
2. *The forms of cooperation under this section may include; (i) promoting join researches; (ii) encouraging and facilitating visits and ecchanges of experts, and exchange of knowledge and tecknology; (iii) promoting capacity building; (iv) promoting the holding of seminars, dialogue and workshops; and (v) other forms to be mutually agreed upon by the parties.”*

Salah satu negara yang dianggap berpotensi bagi Jepang adalah Indonesia dianggap sebai negara yang memiliki berbagai sumber daya alam. Baik sumber daya alam maupun sumber manusia yang berguna bagi kepentingan jepang. Namun demikian, Indonesiapun memiliki kepentingan yang serupa dengan Jepang, yakni dengan teknologi maju yang dimiliki oleh Jepang, diharapkan dengan adanya peningkatan investasi Jepang di Indonesia dan terjadi sebuah alih teknologi dan terciptanya kerjasama dalam hal pengembangan kapasitas negara melalui sector industry yang tertuang dalam *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

IJEPA adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antar Indonesia dan Jepang. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJEPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (*World Trade Organization plus*) (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang telah diatur oleh WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*Capacity Buiding*) sebagai dari *Partnership Agreement*.

Sedangkan tujuan IJEPA adalah meningkatkan kerjasama ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi, fasilitas dan kerjasama ekonomi. Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang (*proper balance*), khususnya menyangkut aspek kerjasama guna membangun kapasitas ekonominya.

Pada intinya, IJEPA merupakan kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang ditujukan untuk meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Namun demikian, sangat disadari bahwa perjanjian kerjasama ini melibatkan dua negara dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang yang untuk sementara waktu mungkin hanya memberikan manfaat asimetris (tidak seimbang) bagi kedua pihak. Hal ini merupakan kondisi *winloose* yang mengancam keberlanjutan kerjasama tersebut dalam jangka panjang. Untuk memperoleh keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak, maka kerjasama IJEPA dilandasi dengan tiga pilar, yaitu ***Liberalization*** (pembukaan akses pasar), ***Facilitation*** (pasar yang terbuka/dipermudah) dan ***Cooperation*** (kerjasama untuk peningkatan kapasitas). Dari ketiga pilar tersebut, pilar *Cooperation* sangat strategik bagi Indonesia karena berfungsi meningkatkan kapasitas industri manufakturing Indonesia, sehingga dapat menghasilkan produk‐produk yang memenuhi persyaratan pasar Jepang yang telah dibuka dua pilar lainnya, sehingga akan didapatkan *winwin condition* maupun persyaratan dari pasar global.[[4]](#footnote-5) Untuk menjamin keberhasilan implementasi IJEPA, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian didalam perundingan yang sangat alot dan melelahkan secara sadar dengan visi jauh kedepan, telah menerapkan strategi berikut: **1.Sektor Penggerak (Driv Activities),2.Program Kesejahteraan (Prosperi Ptyrogram), 3. Pusat Pengembangan Industri Manufaktur atau *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC)[[5]](#footnote-6)**

Perkembangan industri otomotif dewasa ini begitu cepat seiring dengan kemajuan tehnologi dan tingginya tingkat persaingan diantara perusahaan . perusahaan otomotif dalam menciptakan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Perilaku masyarakat yang membutuhkan dan menginginkan sepeda motor dengan merek, kualitas, harga serta dengan desain baru yang ditawarkan pada tingkat harga yang kompetitif merupakan potensi yang harus diperhatikan produsen untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk maju dan berkembang dalam konsep pemasaran perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, dimana kepada merekalah nantinya produk tersebut akan dipasarkan.

Pemahaman akan perilaku konsumen mutlak diperlukan apalagi pada saat sekarang ini perkembangan dari dunia otomotif yang begitu pesat dan cepat membuat intensitas persaingan yang semakin tinggi, dan ini menjadi hal penting bagi para pemasar apabila ingin tetap diterima oleh konsumennya.[[6]](#footnote-7)

Seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Jepang salah satu usaha yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kapabilitas dan mencapai kemakmuran negara di era globalisasi seperti iniadalah dengan mengadakan sebuah bentuk kerjasama ekonomi internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang tentunya mengandung kepentingan nasional di dalamnnya. Kerjasama ini dibentuk melalui sebuah kesepakatan tentudalam bidang ekonomi dengan memegang prinsip keadilan dan tentunya saling menguntungkan.

Di abad ke-21 ini, tidak dapat di pungkiri bahwa ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya semakin besar. Hal ini di karenakan setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam hal memproduksi suatu barang dan jasa yang di butuhkan oleh warga negaranya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka setiap negara harus melakukan kerjasama dengan negara lain, atau dengan kata lain setiap negara tidak dapat berdiri sendiri. Contoh nyatanya dapat kita lihat dari keberadaan barang yang berada di sekitar kita. Tidak semua dari barang tersebut dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri sebaigian besar barang-barang elektronik dari Jepang dan negara produsenelektronik liannya dan sebaliknya kita mengekspor rempah-rempah ke negara-negara di benua eropa. Namun, selain berupa barang, kerjasama anter negara dapat menjadi berupa pinjaman-pinjaman yang diproleh dari luar negeri.

Kelebihan dan kekurangan setiap negara dalam memproduksi barang yang dihasilkan adalah alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai faktor atau alasan yang menyebabkan kerjasama antar negara. Faktor tersebut dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki negara-negara tersebut.[[7]](#footnote-8)

Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.Itu terbukti dengan munculnya produk otomotif barudi setiap tahunnya. Pada tahun 2013, pertumbuhan di industri otomotif semakin kuat. Tahun 2012, penjualan industri otomotif nasional mencetak rekor melampauiangka satu juta unit. Hal ini menyebabkan persaingan antar merek semakin ketat.Perkembangan kelas menengah dan perluasan basis ekonomi disebut sebagai duakekuatan pendorong di balik perkiraan ekspansi industri otomotif Indonesia yangcepat. Aspek pendukung lainnya ialah tingkat kepemilikan industri otomotif di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangganya. DiIndonesia, tingkat penetrasi industri otomotif sekitar 80 kendaraan per 1.000 orang. Dengan populasi 240 juta orang dan pendapatan per kapita yang meningkat, Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi para produsen dan importir otomotif.[[8]](#footnote-9)

Produk industri otomotif sangatlah kompetitif dalam hal bentuk, warna, merek, kualitas dan kecanggihan teknologi. Dengan semakin banyaknya merek industri otomotif yang telah ada, seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Proton, Ford, KIA, Suzuki, Nissan, Hyundai, Chevrolet, Isuzu, maka konsumen dihadapkan pada banyak sekali alternatif pilihan merek. Konsumen sebagai pengguna produk harus cerdas dalam memilih produk, agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Produsen juga harus mengetahui kebutuhan konsumen, agar dapat bersaing dan bertahan di industri. Untuk lebih menancapkan produknya di ingitan konsumen, maka produsen harus lebih seringmengenalkan merek produknya ke konsumen.

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi hal-hal tersebut untuk mengidentifikasikan barang atau jasa seseorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing (Durianto dkk, 2001). Dengan adanya merek suatu barang atau jasa, pelanggan dapat lebih mudah mengenali produk

atau jasa yang kita produksi. Merek telah menjadi suatu unsur yang penting yangberkontribusi terhadap kesuksesan sebuah perusahaan (Tjiptono, 2005).[[9]](#footnote-10)

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti kerjasama IJEPA terhadap industry otomotif di Indonesia yang tertuang dalam skripsi yang berjudul :

 **“PENGARUH IMPLEMENTASI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) DI INDONESIA TERHADAP INDUSTRI OTOMOTIF”**

1. **Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah adanya upaya untuk menjelaskan suatu fenomena pada situasi tertentu. Untuk memudahkan dalam identifikasi masalah diperlukan adanya suatu penjelasan (suriasumantri, 1993 :309)

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana implementasi perjanjian IJEPA?
2. Bagaimana perkembangan industri otomotif pada saat ini?
3. Bagaimana pengaruh implementasi IJEPA terhadap peningkatan industri otomotif di Indonesia?
4. **Pembatasan masalah**

Karena luasnya permasalahan di atas maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada pengaruh implementasi IJEPA di Indonesia dalam bidang otomotif pada tahun 2014

1. **Perumusan masalah**

Perumusan masalah merupakan tingkat lanjut dari identifikasi masalah perumusan masalah dalam penyusunan skripsi dimaksud agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Adapun perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

**“Bagaimana pengaruh implementasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap peningkatan industri otomotif di indonesia?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkritisi bagaimana ruang lingkup perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang terangkum dalam Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA).
2. Mengetahui dan menganalisa sejauh mana perjanjian kerjasama ekonomi kemitraan Indonesia-Jepang ini telah mengakomodir kepentingan-kepentingan baik Indonesia maupun Jepang.
3. Mengetahui keuntungan dan manfaat kejasama IJEPA bagi Indonesia
4. **Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penulis menilai penelitian ini memiliki signifikansi sebagai sumbangan informasi dan masukan, bagi kalangan akademis dan non akademis yang tertarik terhadap isu perdagangan bebas, khususnya yang terkait dengan perumusan dan pengambilan kebijakan luar negeri serta diharapkan dapat memberi sumbangan masukan bagi perkembangan keilmuan ilmu hubungan internasional.
2. Peneliti berharap karya tulis ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan khususnya bagi situasi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama ekonomi kemitraan ini.
3. Sebagai laporan skripsi tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

 Dalam membuat sebuah karya ilmiah, keberadaan teori-teori menjadi sangatlah penting adanya, karena dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu dalam memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Oleh karena itu untuk mempermudah suatu penelitian, penulis menggunakan kerangka konseptual yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga menjadi landasan bagi pembangunan hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

 Dinamika Hubungan Internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat saja, telah mengalami pergeseran, dimana, muncul aktor-aktor lain dalam Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan yang penting. Maka untuk melengkapi penelitian ini perlu menambahkan teori Hubungan Internasional.

 Di dalam pergaulan Internasional setiap negara tidak bias melepaskan diri dari hubungan antar negara yang melintasi batas negara dimana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan negara lain, juga meniliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu di perlukannya hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks dimana setiap segi dari hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kedaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain bias menimbulkan konflik, karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dengan masalah didasarkan pada negara tersebut mempunyai hubungan secara historis dengan negara yang sedang mempunyai konflik dan juga negara tersebut mempunyai kepentingan nasional.

 Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu, kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa diseluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdipliner, artinya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu masalah yang timbul , walaupun perhatian utamanya tetap pada hubungan antar negara dan antar pemerintah. Menurut J.C. Johari:

**“Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara”[[10]](#footnote-11)**

Ilmu Hubungan Internasional juga merupakan bagian dari ilmu hubungan sosial yang mencakup bagian dari aspek kehidupan manusia dari masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan K.J Holsty dalam bukunya Politik Internasional: suatu kerangka analisis tentang konsep Hubungan Internasional:

**“ Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi dianatara masyrakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian hubungan internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, komunikasi serta pengembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[11]](#footnote-12)**

Prilaku hubungan internasional pada jaman sekarang ini tidak terlepas dari pola tatanan dunia internasional yang saling ketergantungan antara satu negara – terhadap negara lain. Pola ini menimbulkan adanya ikatan kerjasama satu negara dengan negara lain. Sebagai mana dikatakan oleh Koesnadi Kartasamita dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional:

 **“ Kerja sama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional tejasi karena nasional understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung utnuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama dianatara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”[[12]](#footnote-13)**

 Dengan melihat prejanjian IJEPA yang terjadinya ketergantungan antar kedua negara diantara Negara-negara maupun organisasi maka mendorong untuk melakukan kerjasama internasional, sama halnya yang dikemukakan oleh K. J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, yang menyatakan bahwa:

**“Kerjasama Internasional merupakan sebagian transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hamper bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”[[13]](#footnote-14)**

 Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain . [[14]](#footnote-15)

 Kerjasama antar Negara sangat penting dilakukan oleh Negara-negara agar dapat mempermudah kerja dan mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama antar Negara dapat berjalan lancar apabila adanya dukungan dari komponen masyarakat dalam Negara yang saling bekerjasama pula. K. J. Holsti juga mengartikan konsep kerjasama lainnya sebagai berikut:

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, kerjasama internasional terjadi karena adanya Nation Understanding dimana mempunyai tujuan dan arah yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identic”**[[15]](#footnote-16)

 Kerjasama antara beberapa negara besar terdapat perbedaan kepentingan mendasar sehubungan dalam kerja sama yang dilakukan. Kecenderungan yang muncul dari kepentingan tersebut adanya polemik pada Ekonomi Politik sehubungan dengan rejim internasional yang berlaku pada globalisasi ekonomi. ekonomi politik internasional menjadi isu yangpenting dalam agenda politik global sebagai dampak dari globalisasi ekonomiyang makin mengarah pada pembebasan pasar dan integrasi ekonomi diberbagai belahan dunia dengan karakteristik yang interdependen dankompleks. Ekonomi politik internasional menurut Mohtar Mas’oed adalahsebagai berikut:

 **“Ekonomi Politik Internasional sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.”[[16]](#footnote-17)**

Dan Robert Gilpin mengartikan ekonomi politik internasional sebagai:

**“Pada satu pihak politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan dengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik”[[17]](#footnote-18)**

Organisasi internasional merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangn hubungan antar negara atau bangsa. Secara umum organisasi internasional itu adalah organisasi yang ada pada masyarakat internasional.

I Wayan Parthiana dalam bukun Organisasi Internasional mendefenisika sebagai berikut:

 **“Organisasi internasional adalah suatu oraganisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh anggota-anggota yang terdiri dari negara-negara atau badan-badan non pemerintahan yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan.”**

Keberhasilan suatu negara dalam kerjasama internasional sangatditentukan oleh *power*, kemampuan tawar menawar dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Kemudian rezim internasional akan bertumpupada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, hankam dan ekonomi. Pada kesempatan Perjanjian IJEPA (*Indonesia Japan Economic Patnership Agreement)* terdapat pola bilateral antar dua negara yang saling ketergantungan.Hubungan bilateral menurut Budiono Kusumahamidjojo :

**“Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptkan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi.”[[18]](#footnote-19)**

 Sebagai sebuah perjanjian bilateral, EPA Indonesia-Jepang tidak dapat dilepaskan dari fakta hubungan ekonomi kedua negara selama ini, apakah bersifat saling melengkapi ( komplementer) ataukah saling bersaing (kompetitor). Kesepakatan Indonesia – Jepang menciptakan satu integrasi ekonomi. Kaum liberal meyakini bahwa perdagangan bebas akan membawa perdamaian dalam hubungan internasional. Perdagangan bebas akan menciptakan interdepedensi dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar. Kaum liberalis berpendapat bahwa liberalisasi dalam ekonomi akan mengarah pada kebebasan pasar dan menimalisasi peran negara. . Robbock menjelaskan perdagangan internasional sebagai berikut:

**“Perdagangan Internasional terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional coorperation untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, tenaga kerja, teknologi dan merk dagang”[[19]](#footnote-20)**

Pasar bebas IJEPA merupakan implementasi kerjasama antara Indonesia-Jepang yang meliberalisasi sektor perdagangan. Pasar itu sendiri menjadi sangat penting bagi kedua negara dalam pemanfaatannya Jepang menerapkan pasar bebas dalam perluasan sektor pasar dalam industri otomotif. Menurut Adam Smith, **Pasar bebas** sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku – pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.[[20]](#footnote-21)

Dalam perjanjian IJEPA Indonesia dan Jepang pasti masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya yang harus terpenuhi. Karena pada dasarnya kerjasama dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Konsep mengenai hal ini memang sangat sulit generalisasikan mengenai apa sajayang termasuk dalam national interest melihat pemerintah yang berbeda-beda tiap negara yang tentu menghasilkan national interest yang berbeda pula, bahkan tidak jarang national interest duduk berlawanan antar negara satu dengan negara yang lain. Menurut **Morgenthau:**

**”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.[[21]](#footnote-22)**

Sedangkan Menurut Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam Kepentingan Nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan, dan keamanan militer, moralitas dan legalitas[[22]](#footnote-23)

Pada dasarnya ada 2 fungsi dari national interest. Yang pertama adalah menentukan arah para pemimpin negara dalam politik luar negeri. Dan juga sebagai ukuran keberhasilan pemimpin negara menjalankan politik luar negerinya.

Fungsi lain dari national interest adalah agar negara bisa tetap survive dan menjaga eksistensi negara. Dengan kepentingan nasional maka negara akan mempunyai sebuah power, mepunyai bargaining position terhadap negara lain. Sehingga dengan power yang dimiliki ini negara akan tetap terjaga eksistensinya dalam kancah politik internasional

 Dalam kepentingan nasional kita tidak terlepas dari motivation maker. Motivasi Negara dalam membuat kepentingan nasional itu sendiri adalah tergantung dari kebutuhan Negara dan posisi Negara itu sendiri. Motivation maker adalah hal-hal yang memotivasi negara dalam melakukan kepentingan nasionalnya. Kepentingan suatu negara tersebut juga adalah cara upaya suatu negara untuk mendapatkan power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap Negara lain. Motif negara melakukan kepentingan nasional dapat dibagi menjadi 4 motif. Yaitu individu, ideologi, organisasi dan strategi.

 Pembuat motivasi kepentingan nasional dapat berasal dari pemikiran seorang individu. Individu dapat berperan dalam kebijakan yang dibuat oleh Negara. Contohnya adalah, B.J Habibie yang merupakan mantan presiden Indonesia, Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Dalam hal ini kepentingan nasinalnya adalah menjaga kepercayaan Negara lain atas Indonesia. Membuktikan bahwa Indonesia bisa bergerak dalam kanca Internasional pada saat itu.

 Yang kedua adalah ideologi. Kepentingan nasional dapat berasal dari ideologi negara, sebagai contoh adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara itu dahulu ingin melebarkan ideologinya di dunia. Dalam hubungan internasionalnya dengan negara lain Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai kepentingan mempengaruhi negara lain untuk menganut ideologinya. dapat kita mengambil contoh lain, yaitu China dan Korea Utara. Kedua Negara tersebut begitu menjunjung tinggi ideology yang mereka anut, ideologi komunis. Dalam hal ini kedua Negara tersebut sulit mendapat invansi ideologi lain.

 Selanjutnya adalah organisasi , pembuat motivasi dapat berasal dari sebuah organisasi seperti kepentingan suatu partai atau golongan yang dapat mewakili kepentingan negara. Hal ini tentu saja tidak hanya menjadi keuntungan golongan, tetapi negara juga mendapat keuntungan. Contohnya, Indonesia memiliki begitu banyak organisasi, mereka saling bekerja sama antar organisasi bahkan dengan organisasi diluar Negara Indonesia, mereka membahas masalah-masalah yang masih hangat dan mencari penyelesaiannya bersama kemudian menyampaikan aspirasi kepada pihak yang lebih berwenang dalam permasalahan tersebut. Kepentingan nasional disini adalah pendekatan dengan Negara lain agar lebih mudah dalam menjalin kerjasama.

 Yang terakhir adalah starategi. Strategi dapat dijadikan motivaton maker negara melakukan national interest. Seperti Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan minyak. Maka Amerika mempunyai strategi untuk menginvasi Iraq dengan alasan utama adalah untuk menumpas terorisme, padahal pada kenyataannya Amerika juga mengambil sumber daya alam yaitu minyak yang terdapat di negara yang diinvasinya.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan pemaparan dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik asumsi sebagai berikut :

1. Dengan dilakukannya kerjasama antar negara Indonesia dan Jepang maka akan dapat memenuhi kepentingan nasional kedua negara tersebut.
2. Dengan di tandatanganinya kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang dapat mempermudah pemenuhan pelaku dan elemen ekonomi dalam pasar internal serta meningkatkan perekonomian untuk kemakmuran kedua negara yang terlibat.
3. Dengan sepakatinya perjanjian kerjasama dalam bidang industry otomotif maka di harapkan akan meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di bidang otomotif.
4. Dengan adanya kerjasama IJEPAini maka diharapkan dapat meningkatkan dan mempererat hubungan perdagangan antara kedua negara baik Indonesia maupun Jepang.

Berdasarkan konsep yang telah penulis paparkan tersebut, maka penulis dapat menggunakan teori-teori tersebut untuk menentukan bagaimana pengaruh implementasi IJEPA terhadap industry otomotif di indonesia.

Salah satu strategi yang harus di tempuh untuk mendukung pembangunan suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Industrialisasi sendiri menurut Edy Suwandi Hamid dalam bukunya Industrialisasi mengatakan bahwa Industrialisasi adalah:

**”Industrialisasi adalah peroses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya , baik yang berasal dari dalam maupun dari luar”.[[24]](#footnote-25)**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis perlu mengemukakan inti dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis melihat bagaimana upaya dari setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya salah satunya dengan melakukan kerjasama internasional. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Jepang dalam bidang industry melalui Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. IJEPA adalah:

**“IJEPA adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antar Indonesia dengan Jepang. IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang di tanda-tangani pada tanggal 20 agustus 2007 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Mentri Shinjo Abe”.**

Terbentuknya kerjasama IJEPA ini tidak terlepas dari sejarah diplomasi antar Indonesia dan Jepang dimana awal mulanya Indonesia merupakansalah satu jajahan negara Jepang 1958 Jepang dan Indonesia memulai hubungan diplomatik antar kedua negara S.L Roy dalam bukunya *Diplomacy*mempunyai definisi tentang diplomasi yang di terjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut:

“**Diplomasi yang sangat erat hubunganya dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam memperoleh tujuan yang di inginkan, diplomasi mengijinkan menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”.**

IJEPA merupakan kerjasama perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan oleh Indonesia, dan dan yang paling komprehesif. IJEPA adalah sebuah Free Trade Agreement New-Age (FTA babak baru) yang salah satunya mencangkup liberalisasi.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika Indonesia Jepang Partnership Agreement (IJEPA) diimplementasikan melalui program-program MIDEC dan USDFS, Maka industri otomotif di Indonesia akan meningkat”**

**3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Teoritik, Empirik dan Analisis)**

**Tabel Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Jika Indonesia Jepang Partnership Agreement (IJEPA) di implementasikan dengan baik | 1. Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC)
 | 1. Data (fakta dan angka) Sektor industri otomotif termasuk industri yang spesifik sehingga diprioritaskan dalam pelaksanaan kerjasama Indonesia-Jepang melalui IJEPA-MIDEC (http://www.kemenperin.go.id/kajian)
 |
| 1. Adanya upaya User Specific Duty Free Scheme (USDFS)
 | 1. Data (fakta dan angka) Berdasarkan data di Departemen Perindustrian sejak diberlakukannya USDFS tanggal 1 Juli 2008 2009 telah ada 56 perusahaan yang mengajukan permohonan verifikasi, yang terdiri dari 50 perusahaan atau 89,2% sektor industri kendaraan bermotor. (http://www.kemenperin.go.id/kajian)
 |
| 1. Adanya upaya evaluasi oleh pemerintah.
 | 1. Data (fakta dan angka) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengevaluasi dan menegosiasikan pelaksanaan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).(http://www.jurnalasia.com/2015/06/09/kemenperin-evaluasi-pelaksanaan-ijepa/#sthash.UMtpxhJ6.dpuf)
 |
| Variabel Terikat:Maka industri otomotif di Indonesia akan meningkat. | 1. IJEPA berhasil mencapai target dalam sector industri otomotif.
 | 1. Data (fakta dan angka)  volume produksi mobil yang dipatok 1 juta unit per tahun dan produksi sepeda motor sebesar 8 juta unit per tahun berhasil dicapai.(http://industri.kontan.co.id/news/kerjasama-ijepa-hanya-berhasil-di-5-sektor)
 |
| 1. Motor Buatan Indonesia Laris di Inggris dan Jerman.
 | 1. Data (fakta dan angka) Performa ekspor sepeda motor buatan Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan.Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan kenaikannya mencapai 500 persen. (http://otomotif.liputan6.com/read/2453218/motor-buatan-indonesia-laris-di-inggris-dan-jerman)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Jepang

Indonesia

**Kerjasama Internasional**

**Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)**

**PROGRAM MIDEC**

**PROGRAM USDFS**

**Peningkatan industri ototmotif Indonesia**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

 Level of analysis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan pada fokus perhatian pada masalah yang dikaji. Unit analisa merupakan perilaku yang akan di deskripskikan karena itu juga dapat disebut variable dependen yang dalam penelitian ini ”di Indonesia dalam bidang otomotif” adalah pada tingkat Negara dan Bangsa, sedangkan unit eksplanasi adalah “Implementasi IJEPA” pada tingkat Sistem Regional dan Global. Karena tingkat eksplanasi dan unit analisanya pada tingkatan yang sama, maka tingkat analisis yang digunakan adalah Korelasionis.

1. **Metode Penelitian**

 Metode penelitian dapat memandu dan meudahkan penelitian dalam berhubungan dengan objek penelitian. Metode adalah salah satu cara atau langkah yang di terapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah, yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara-cara pemecahannya berdasarkan atas data-data yang dihimpun. Dalam kesempatan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis sebagai penelitian.

1. Metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematik dan menggandakan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab akibat dan penyusunan data, metode ini pada akhirnya akan dapat di komprasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggamarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sector industri otomotif yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian yang bersifat actual yang berada di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena social tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan data dan menyusun data, melainkan meliputi juga analisis dari interperstasi data-data tentang IJEPA.
2. **Teknik Pengumpulan Data**

 Dalam rangka usaha untuk memperoleh data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach,* yaitu data-data yang bersumber ataupun diambil dari media online, buku, jurnal, dan website.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

 Penulis merencanakan akan melaksanakan penelitian guna mendapatkan data-data yang di perlukan di beberapa tempat sebagai berikut:

* Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
* Perpustakaan Universitas Parahiyangan Jl. Ciumbeluit, Bandung.
* Perpustakaan Universitas Indonesia
* Pepustakaan Universitas Padjajaran, Jalan raya Bandung Sumedang km, 21 Jatinangor, Jatinangor.
1. **Lamanya Penelitian**

Peneliti memperkirakan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 – April 2016 (6Bulan).

1. **Sistematika Penulisan**
* Pada **BAB I**berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Sumber Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan
* Pada **BAB II**ini akan membahasuraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut, yaitu definisi dari sosial media. Kemudian Bab ini akan memberikan konteks historis atas munculnya IJEPA, tujuan IJEPA, prinsip dasar IJEPA, sector-sektor IJEPA, dan apa saja pengaruh dari IJEPA itu sendiri.
* Pada **BAB III**ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain, secara khusus akan membahas industri otomotif di Indonesia.
* Dalam**BAB IV**ini berisikan pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data dalam rangka untuk menganalisis .
* Akhirnya, dalam **BAB V**akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah didapatkan.
1. Achdiat Atmawinata, “Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat”, Jakarta, Desember 2007, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan. Pres Release Penerbitan PMK-PMK Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. (Jakarta:2008) [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* hal. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Achdiat Atmawinata, “KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL: KAJIAN CAPACITY BUILDING INDUSTRI MANUFAKTUR MELALUI IMPLEMENTASI MIDEC‐IJEPA”, Jakarta, desember 2008. Hal 7-8. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., hal. 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48023/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 20.50 WIB [↑](#footnote-ref-7)
7. Susana Puspa Dewi,”kerjasama IJEPA dan implikasinya terhadap hubungan perdagangan Indonesia-Jepang”, skripsi FISIP HI Unpas tidak diterbitkan, 2013, hal 2-3. [↑](#footnote-ref-8)
8. repository.unand.ac.id/21977/3/bab%201.pdf [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid, hal. 3-4 [↑](#footnote-ref-10)
10. J.C Johari **“**Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara” diakses dari http:// [www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut](http://www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut) para ahli ; pada 20 Maret 2016; pkl 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-11)
11. Kj. Holsty,*Politik Internasional,* Remaja Rosda karya Bandung; 1988,hal 21-22. [↑](#footnote-ref-12)
12. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Jakarta: pustaka remaja, 1987) Hal 28. [↑](#footnote-ref-13)
13. K. J. Holsti, Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis (Terjemahan Wawan Juanda, 1992, Bandung: Binacipta), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, hal. 362-363 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid.,hal. 20 [↑](#footnote-ref-16)
16. Moechtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S,1994), hlm. 118-119. [↑](#footnote-ref-17)
17. Robert Gilpin, *US Power and The Multinational Corporation* (New York: Basic Books, 1975),

hlm. 21-22 dalam Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik*

*Internasional, dan Tatanan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 223-224. [↑](#footnote-ref-18)
18. Kusumohamidjojo Budiono, Hubungan Internasional ; Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Hal 95 [↑](#footnote-ref-19)
19. Robbock dalam Perdagangan Internasional, diakses dari: <http://www.gudangmateri.com/2015/10perdagangan-internasional.html>, pada 20 Maret 2016 pkl. 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-20)
20. <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-bebas-dan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tgl, 20 Maret 2016, Pkl, 20.00 Wib. [↑](#footnote-ref-21)
21. Op,Cit. [↑](#footnote-ref-22)
22. Daniel S. Papp, Contemporary International Relation: A Framework for Understanding, 2nd end, MacMillan Publishing Company, New York, 1988. [↑](#footnote-ref-23)
23. <http://diah_faid-fisip12.web.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 27 maret 2016 pukul 17.00WIB [↑](#footnote-ref-24)
24. Edi Suwandi Hamid, Industrialisasi (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 190. [↑](#footnote-ref-25)